

**PENGADAAN GURU BUMIPUTERA UNTUK MEMENUHI PROGRAM
PENDIDIKAN PADA MASA POLITIK ETIS**

(Skripsi)

Oleh

**WAHYUNI ATIKA
NPM 1713033005**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENGADAAN GURU BUMIPUTERA UNTUK MEMENUHI PROGRAM PENDIDIKAN PADA MASA POLITIK ETIS

Oleh

WAHYUNI ATIKA

Politik etis yang terjadi pada awal abad ke-19 dengan memperbaiki sistem pendidikan di Hindia Belanda dengan memberi kesempatan bagi anak pribumi untuk mengenyam pendidikan. Tujuan dari pelaksanaan politik etis dalam bidang pendidikan adalah memberi kesejahteraan kepada rakyat Hindia Belanda dengan cara memberantas buta huruf agar mereka dapat bekerja lebih layak. Keberadaan sekolah yang tidak seimbang dengan keberadaan guru menjadi permasalahan baru di dunia pendidikan, sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini memiliki rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimanakah pengadaan guru untuk memenuhi program pendidikan pada masa Politik etis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode penelitian sejarah, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil yang didapatkan penelitian mengenai pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis, pemerintah berupaya dengan cara membangun sekolah guru, melatih guru bumiputera agar dapat memenuhi kekurangan guru Belanda.

Kata Kunci : Politik Etis, Pendidikan, Guru Bumiputera

ABSTRACT

PROCUREMENT OF BUMIPUTERA TEACHERS TO FULFILL EDUCATION PROGRAMS IN ETHICAL POLITICAL TIMES

By

WAHYUNI ATIKA

Ethical politics that occurred in the early 19th century by improving the education system in the Dutch East Indies. provide opportunities for indigenous children to receive education. The purpose of implementing ethical politics in the field of education is to provide welfare to the people of the Dutch East Indies by eradicating illiteracy so that they can work more properly. The existence of schools that are not balanced with the presence of teachers is a new problem in the world of education, so the government makes several efforts to solve the problem. This study has a research problem formulation, namely, how is the procurement of teachers to fulfill educational programs during the era of ethical politics. The purpose of this study was to determine the procurement of Bumiputera teachers to fulfill educational programs in the era of ethical politics. The research method used in this research is the historical research method, with library data collection techniques and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The results obtained are research on the procurement of Bumiputera teachers to fulfill educational programs during the ethical political era, the government seeks to build teacher schools, train Bumiputera teachers in order to meet the shortage of Dutch teachers.

Keywords: Ethical Politics, Education, Bumiputera Teachers

**PENGADAAN GURU BUMIPUTERA UNTUK MEMENUHI PROGRAM
PENDIDIKAN PADA MASA POLITIK ETIS**

Oleh
Wahyuni Atika

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PENGADAAN GURU BUMIPUTERA UNTUK
MEMENUHI PROGRAM PENDIDIKAN PADA MASA
POLITIK ETIS**

Nama Mahasiswa : **Wahyuni Atika**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1713033005

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1. MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,  Pembimbing II, 

Drs. Ali Imron, M.Hum
NIP. 19570817 198502 1 002

Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 201804870319101

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP. 19600826 198603 1 001

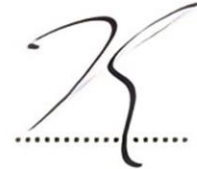
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah, 

Henry Susanto, S.S., M.Hum.
NIP. 19700727 199512 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ali Imron, M.Hum.



Sekretaris : Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.



Penguji
Bukan Pembimbing : Henry Susanto, S.S., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juli 2021

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Mahasiswa : Wahyuni Atika
Nomor Pokok Mahasiswa : 1713033005
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jln. Tegalsari No.1, Desa Purwosari, Kecamatan
Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditukus atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka

Bandar Lampung,, 23 Agustus 2021




Wahyuni Atika
1713033005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wahyuni Atika yang dilahirkan di Maulama, 31 Mei 1999 tepatnya di kota Palembang, Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Hermanto dan Ibu Melinda.

Pendidikan Penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 3 Maulama, lalu pindah sekolah pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah di SMP PGRI 1 Gadingrejo dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan penulis berlanjut di SMA Negeri 1 Gadingrejo lalu lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan strata 1. Penulis mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pendidikan Sejarah melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2017. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejosari Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2019, pada tahun 2020 penulis melaksanakan kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negeri 1 Gadingrejo. Selama melaksanakan perkuliahan penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat program studi. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diikuti adalah Forum Mahasiswa Pendidikan Sejarah menjabat sebagai sekretaris bidang Sosial Masyarakat (SOSMAS).

MOTTO

Historia Magistra Vitae
(sejarah adalah guru kehidupan)

(CICERO)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya. Dengan keikhlasan hati dan mengharap ridho-nya kupersembahkan sebuah karya kecil ini sebagai tanda cinta dan sayangku kepada :

Kedua orang tuaku Bapak Hermanto dan Ibu Melinda yang telah ikhlas memberikan segala pengorbanan bagi kebaikan putrimu ini, selalu mendukung melalui doa serta jerih payah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, sehingga putrimu ini berhasil menyelesaikan studinya dan nasihatnya yang menjadi jembatan Perjalanan Hidupku. Serta Kak Meilisa, Kak Yongki dan Adik Miki yang selalu memberi dukungan agar aku dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

Para pendidik yang senantiasa membimbing dan memberikan Ilmu untuk dapat menjadi orang yang bermanfaat selalu bagi bangsa, Agama dan lingkungan sekitar

Terimakasih untuk Universitas Lampung yang telah memberi banyak pembelajaran dan pengalaman yang akan menjadi tempat bersejarah bagi hidup saya.

Almamater tercinta “Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu dinantikan di Yaumul Kiamah nanti, Aamiin. Penulisan skripsi yang berjudul “Pengadaan Guru Bumiputera Untuk Memenuhi Program Pendidikan Pada Masa Politik Etis”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja., M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Bapak Henry Susanto, S.S, M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung serta dosen pembahas skripsi penulis.
7. Bapak Drs. Ali Imron, M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik serta sebagai Pembimbing I skripsi penulis.
8. Bapak Marzius Insani, S.Pd, M.Pd., sebagai Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak Drs. Maskun, M., Ibu Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum., Bapak Drs. Syaiful. M. M.Si., Bapak Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd., Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., Bapak Cheri Saputra, S.Pd., M.Pd., Ibu Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd., Bapak Sumargono, S.Pd., M.Pd., Ibu Valensy Rachmedita, S.Pd., M.Pd., Bapak Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd., Bapak Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Aprilia Tri Aristina, S.Pd., M.Pd., sebagai Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang penulis banggakan dan pendidik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.

11. Sahabat serta teman seperjuangan, Titik Safitri, Ratna Intan Angreini, Mia Cindy Lestari, Risa Adelia, Dewi Ayu Ningsih, Ulfa Diana. Yang telah memberikan semangat dan bantuan baik secara materi maupun non materi selama ini.
12. Sahabat serta teman kost, Mei Gita yang selalu memberi semangat dan menjadi tempat bercerita.
13. Keluarga besar Pendidikan Sejarah, terima kasih atas segala kekeluargaan dan kebersamaannya selama ini.

Semoga hasil penulisan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 02 Juni 2021

Wahyuni Atika
1713033005

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Analisis Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Batasan Masalah.....	6
1.2.3 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Pikir	7
1.6 Paradigma	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Konsep Pengadaan	10
2.1.2 Konsep Pengadaan Tenaga Pendidik (Guru)	11
2.1.3 Konsep Guru Bumiputera	12
2.1.4 Politik Etis.....	16
2.1.5 Konsep Program Pendidikan Pada Masa Politik Etis.....	22

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan	27
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Teknik Analisis Data.....	34
3.4 Ruang Lingkup Penelitian	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil.....	38
4.1.1 Latar Belakang Kebijakan Politik Etis di Hindia Belanda	38
4.1.2 Pelaksanaan Politik Etis.....	40
4.1.3 Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan Politik Etis	46
4.1.3.1 Program Irigasi.....	46
4.1.3.2 Program Transmigrasi.....	49
4.1.3.3 Program Pendidikan	51
4.1.4 Guru Bumiputra Bumiputera Pada Masa Politik Etis.....	62
4.1.5 Upaya Pengadaan Guru Bumiputera Oleh Pemerintah Pada Masa Politik Etis	67
4.2 Pembahasan	75
4.2.1 Latar Belakang Pengadaan Guru Bumiputera	75
4.2.2 Proses Pengadaan Guru Bumiputera	78
4.2.3 Hasil Dari Upaya Pemerintah Hindia Belanda Dalam Pengadaan Guru Bumiputera	81

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Mata Pelajaran di <i>Kweekschool</i>	15
4.1 Pembangunan Irigasi Oleh Pemerintah Kolonial Belanda Sampai Tahun 1930.....	48
4.2 Pertumbuhan Penduduk Jawa dan Madura 1815-1940.....	50
4.3 Jumlah Sekolah <i>Europeesche Lagere School</i>	54
4.4 Mata Pelajaran di HBS hingga tahun 1935	57
4.5. Mata Pelajaran MULO (<i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>).	58
4.6 Gaji Guru Berdasarkan Ijazah.....	64
4.7 Distribusi Guru di Sekolah Negeri Berdasarkan ijazahnya di Hindia Belanda, 1930-1940	74

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia, aspek pendidikan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Perjalanan pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari yang mulanya hanya diperuntukan untuk kalangan agamawan dan bangsawan, sehingga pendidikan dapat merata untuk semua kalangan. Pada awalnya pendidikan masih bertujuan untuk misi penyebaran agama. Pola pendidikan mulai memiliki tujuan yang berbeda ketika memasuki awal abad ke-20.

Pendidikan dianggap penting bagi perkembangan sebuah bangsa. Lembaga yang secara langsung mendorong adanya perkembangan ilmu pengetahuan antara lain lembaga sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan. Munculnya kebutuhan para pemerintahan dan pengusaha swasta di Hindia Belanda mengenai tenaga-tenaga terampil yang murah menjadi awal berdirinya sekolah sistem Barat di Hindia Belanda. Guna menggantikan tenaga terampil bangsa Belanda atau bangsa Barat yang lainnya karena pada saat itu tenaga terampil dinilai mahal (Paeni, 2009).

Kemunculan artikel *Een Eereschuld* (Utang Kehormatan) yang dimuat dalam majalah *De Gids* tahun 1899 ditulis C. Th van Deventer, telah mendorong lahirnya Politik Etis atau Politik Balas Budi yang secara resmi dirancang oleh Ratu Belanda tahun 1901 (Leirissa, 1985). Politik etis memiliki slogan “*Educatie, Irrigate, Emigrate*” (Pendidikan, Irigasi, Emigrasi). Politik etis merupakan kebijakan yang diperjuangkan oleh golongan liberal dan sosial demokrasi yang menginginkan adanya suatu keadilan yang diperuntukan bagi Hindia Belanda yang dianggap begitu banyak membantu dan meningkatkan adanya devisa dan kemakmuran bagi pemerintahan Belanda (Oktavianuri 2018).

Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam tiga program utama, yaitu:

1. Irigasi, yaitu program untuk memperbaiki pengairan pada lahan-lahan pertanian rakyat bumiputera dengan membangun bendungan dan jalur-jalur pengairan.
2. Imigrasi, yaitu program untuk pemerataan penduduk dari pulau Jawa Yang padat menuju daerah-daerah luar jawa yang masih jarang penduduknya.
3. Edukasi, yaitu program untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Hindia Belanda dengan pemerataan kesempatan belajar dan pendidikan sekolah rakyat (Sumanto 1983).

Pelaksanaan salah satu programnya politik etis yaitu program pendidikan, Belanda mengatur pendidikan dengan sistem prosedural yang ketat. Pendidikan

yang diberikan akan dibedakan berdasarkan tiap-tiap golongan stratifikasi sosial. Pemerintah lebih mengutamakan anak-anak berketurunan Eropa. Cara menentukan status seseorang, pemerintah berpegang pada penghasilan. Jika penghasilan diatas *fl* 1.200 setahun akan dianggap memiliki status yang cukup (Neil, 1997).

Terdapat lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kaum bangsawan atau priyayi yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS) merupakan sekolah dasar Eropa yang hanya menerima calon peserta didik berketurunan Belanda dan memberikan izin terhadap orang-orang keturunan Hindia Belanda yang berdarah bangsawan, *Hollandse Inlandse School* (HIS) merupakan sekolah dasar disediakan untuk bangsawan pribumi namun pada pelaksanaannya banyak rakyat biasa dapat memasuki sekolah ini, *Hogere Burger School* (HBS) merupakan sekolah menengah dan sekolah lanjutan bagi peserta didik lulusan ELS dan *Opleiding School Voor Inlandshe Ambteneran* (OSVIA) merupakan sekolah dasar yang disebut juga Sekolah Raja (Mestoko, 1996).

Pada aspek politik etis dalam program pendidikan, Belanda telah membawa perubahan yang besar dalam dunia pendidikan dan intelektual rakyat bumiputera. Sejak tahun 1900 banyak berdiri sekolah untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah Jawa. Rakyat bumiputera merasakan keuntungan yang besar, mereka memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bersekolah. Tercatat sampai tahun 1940 anak bumiputera yang bersekolah di sekolahan

rendah telah berjumlah 2 juta lebih dan di sekolah Belanda tercatat sebanyak 88 ribu peserta didik (Sumanto 1983).

Peningkatan jumlah peserta didik serta jumlah sekolah yang dibangun menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan yaitu terjadi kekurangan jumlah tenaga pendidik yang tidak seimbang dengan perkembangan sekolah. Sehingga membuat pemerintah harus memikirkan upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Menurut S. Nasution (2008) menyebutkan 5 macam guru pada masa Hindia Belanda, yaitu:

1. Guru yang berwenang penuh lulusan Sekolah Guru,
2. Guru melalui uji guru tanpa menempuh lulusan Sekolah Guru dan karena itu mendapat gaji yang lebih rendah,
3. Guru bantu melalui ujian guru bantu,
4. Calon guru atau magang, dan
5. Guru darurat.

Pendidikan Keguruan ini mulai diatur pada tahun 1871 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa pengadaan sekolah dasar bumiputera harus didahului oleh pengadaan tenaga gurunya. Oleh karena itu maka pemerintahan mulai mengadakan sekolah yang menjuruskan siswa untuk menjadi seorang calon guru yang nantinya akan mengimbangi dengan berkembangnya pendidikan. Pada saat politik etis sekolah mulai banyak didirikan di wilayah-

wilayah yang ada di Hindia Belanda, sehingga kebutuhan akan tenaga pendidik sangat meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka peneliti ingin melihat upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah kekurangan guru khususnya guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa Politik Etis. Pemaparan menjadi alasan bagi peneliti untuk menggunakan judul **“Pengadaan Guru Bumiputera Untuk Memenuhi Program Pendidikan Pada Masa Politik Etis”**.

1.2 Analisis Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Politik Etis Tahun 1900-1942
2. Program pendidikan yang dijalankan pemerintahan Belanda pada Masa Politik Etis
3. Pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa Politik Etis

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu, berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah pada identifikasi masalah yaitu “ Pengadaan guru Bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa Politik Etis”

1.2.3 Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa Politik etis”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu:

1.4.1 Bagi Universitas Lampung

Untuk menambah koleksi hasil penelitian khususnya menyangkut pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis.

1.4.2 Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan dalam menganalisis pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis.

1.4.3 Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan bagi penulis akan kesejarahan yakni mengenai pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis.

1.4.4 Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan akan salah satu sejarah Indonesia yaitu mengenai pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis.

1.5 Kerangka Pikir

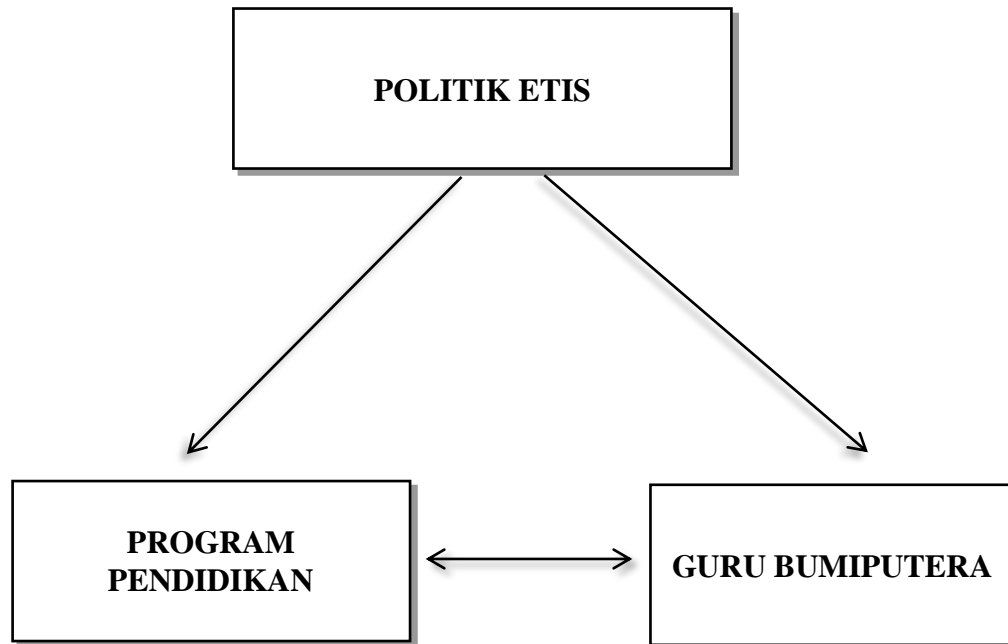
Kebijakan pemerintah mempengaruhi perkembangan pendidikan yang berawal pada abad ke-20, dengan diberlakukannya politik etis. Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “ kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh bahan-bahan dan pejabat-pejabat pemerintah”. Jadi sebuah kebijakan pemerintah pada masa politik etis dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pribumi yang dituangkan dalam tiga kebijakan yaitu irigasi, transmigrasi dan pendidikan.

Politik Etis diterapkan pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan politik etis setelah adanya kritik dari kaum sosialis-liberalis terhadap



kebijakan-kebijakan pemerintahan Belanda di Hindia Belanda seperti kebijakan Tanam Paksa (1830-1870) dan Kebijakan Liberal (1870-1900). Kebijakan tersebut dianggap tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat. Kaum sosialis-liberalis merasa prihatin dengan kondisi yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat pribumi.

Kebijakan yang berlangsung pada akhir pemerintahan kolonial Belanda terkenal dengan slogan 'edukasi, irigasi, dan emigrasi' berkat kebijakan ini banyak sekolah yang dibuka untuk peluang pendidikan bagi kaum pribumi. Sistem pendidikan di Indonesia lahir berkat adanya Politik Etis. Tercatat sampai tahun 1940 jumlah peserta didik pribumi yang bersekolah di sekolah rendah mencapai ±2 juta dan yang mengenyam pendidikan di sekolah Belanda sebanyak 88 ribu peserta didik. Peningkatan jumlah peserta didik dan sekolah maka dibutuhkan pula tenaga pendidik sebagai penunjang berjalannya kebijakan pemerintahan Belanda, pengadaan sekolah harus didahului oleh pengadaan tenaga gurunya. Guru ada karena adanya sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia terlahir berkat Politik etis.

1.6 Paradigma



Keterangan :

- a.  : **Garis Tujuan**
- b.  : **Garis Hubungan**

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pengadaan

Pengadaan (*Procurement*) adalah proses bisnis memilih sumber, pemesanan, dan memperoleh barang/jasa. Barang/jasa tersebut bisa diperoleh secara internal bila barang dihasilkan oleh entitas lain dalam perusahaan (Bodnar, 2003). Pengadaan adalah sebuah cara yang digunakan perusahaan untuk memperoleh kebutuhan berupa barang atau jasa dari luar perusahaan (Putra, 2015).

Christopher & Schooner (2007) yang dikutip oleh Novitaningrum (2014) menyatakan bahwa :

“Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.”

Pengadaan barang dan jasa memiliki pengertian berupa upaya pihak pemakai untuk memperoleh atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkan, dengan memakai cara dan proses tertentu guna mencapai harga yang sesuai dengan kesepakatan, maka kedua belah pihak penerima dan pemberi haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip,

metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku (Sutedi, 2012). Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka pengadaan adalah sebuah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien. Sesuai dengan metode dan prosesnya dengan kebutuhan penggunanya

2.1.2 Konsep Pengadaan Tenaga Pendidik (Guru)

Kesuksesan yang dialami oleh suatu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah terdapat pada pengelolaan tenaga pendidik maka dibutuhkan sebuah manajemen sumber daya manusia di sekolah. Wukir (2013) menjelaskan bahwa Pengadaan guru merupakan sebuah kegiatan guna memperoleh guru yang memiliki kualitas ataupun kuantitas yang diperlukan guna mencapai tujuan sekolah, sebab guru yang berkualitas mampu meningkatkan keberhasilan tujuan sekolah.

Sumber manusia mempunyai andil yang besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan seseorang yang mampu memberikan sumbangan suatu unsur masukan (*input*) yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran (*output*) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan (Rivai, 2004).

Keberadaan manusia merupakan modal organisasi yang sangat krusial, sebab keberadaanya tidak dapat digantikan oleh sumberdaya yang lain. Maka

keberadaan guru di sebuah lembaga sekolah menjadi tonggak utama untuk mencapai tujuan serta meningkatkan mutu Sekolah. Selain itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang dapat mengelola guru dan staf lainnya.

Pengadaan guru atau tenaga pendidik pada penelitian ini meliputi rekrutmen dan seleksi. Pengadaan guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada masa politik etis, dan tidak hanya mengisi kekosongan dan mendapatkan guru untuk proses pembelajaran saja, namun guru yang mempunyai dedikasi dan profesional di bidangnya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan pada saat itu. Pengadaan guru pada masa politik etis yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengadaan guru untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis.

2.1.3 Konsep Guru Bumiputera

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua pendidik adalah seorang guru, , sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan, Roestiyah N.K. mengatakan bahwa:

“Seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang mampu dan serta mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi profesional pendidikan memegang teguh kode etik profesinya ikut serta dalam mengkomunikasikan usaha pengembangan profesi bekerja sama dengan profesi lainnya” (Roestiyah, 2001).

Dalam definisi yang sederhana, Guru merupakan tenaga pendidik yang memberikan ilmu pengetahuan terhadap peserta didik. Guru dimata masyarakat adalah seorang yang melakukan pendidikan di tempat-tempat tertentu baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Guru juga dianggap sebagai pendidik profesional dikarenakan guru telah mendedikasikan dirinya untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik, selain itu guru dapat dikatakan suatu jabatan, kedudukan, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya kepada lembaga pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpolo, formal, dan sistematis (Oviyanti, 2013).

Profesi guru dianggap sebagai seorang yang harus mempunyai kepribadian yang baik dan mental yang tangguh, sebab guru menjadi contoh bagi peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Setiap guru hendaknya mampu mempunyai kepribadian yang akan dicontoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja (Darajat, 2005)

Guru pada masa Hindia Belanda dihasilkan dari sekolah yang bernama *Kweekschool* (Pendidikan Keguruan). Pendidikan keguruan dimulai pada tahun 1871 setelah dikeluarkannya peraturan oleh pemerintahan Belanda yang menyatakan bahwa keberadaan sekolah dasar bumiputera hendaklah didahului dengan keberadaan tenaga gurunya, selanjutnya pendidikan keguruan berkembang hingga ke perguruan tinggi pada saat ini (Mestoko, 1979).

Tahun 1875 didirikan sebuah Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*) terdapat di Surakarta dan Magelan dengan menggunakan bahasa Jawa dan Melayu sebagai bahasa pengantar serta peserta didik dari kalangan “orang-orang Jawa yang sopan”. Keberadaan *Kweekschool* tidak hanya ada di Surakarta tetapi tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti yang terdapat di Bukittinggi (1856), Tapanuli (1864), Tondano (1873), Ambon (1874), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875), Makassar (1876), Padang Sidempuan (1879) (Dewi, 2019).

Jenis-jenis sekolah guru pada awal abad ke-20 adalah (1). *Normaalschool*, yaitu sekolah guru dengan lama pendidikan 4 tahun dan menerima lulusan dari sekolah *Vervolg* atau sekolah kelas II, (2). *Hogere Kweekschool* (HKS) yaitu sekolah guru dengan lama belajar 3 tahun, (3). *Hollands Chinese Kweekschool* (HCK) yaitu sekolah guru Cina yang sederajat dengan HIK dan Kursus *Hoofdakte*.

Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*) pada tahun 1871 meliputi: bahasa daerah (dengan buku karangan Belanda), berhitung (menggunakan buku Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau daerah), Geometri elementer, Geografi (meliputi Indonesia, Nederland, dan dunia), Sejarah, Ilmu Alam (Botani, *Zoology* dan Fisika), Menggambar, Pedagogik (teori dan Praktik), Menulis tangan (Huruf latin, Jawa, dan lain-lain tergantung daerahnya), dan Bernyanyi (Nasution, 2008).

Kurikulum yang digunakan sekolah *Kweekschool* yang ada di Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Mata Pelajaran Di *Kweekschool*

No	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
1	Bahasa Melayu	7	7	5
2	Bahasa Sunda	7	6	5
3	Menulis	4	3	2
4	Berhitung	7	7	6
5	Ilmu Ukir	2	2	2
6	Ilmu Bumi	3	4	5
7	Sejarah	1	2	3
8	Ilmu Alam	1	2	3
9	Menggambar	4	3	2
10	Ilmu Mendidik	-	-	3
11	Bernyanyi	1	1	1
JUMLAH		37	37	37

Sumber: Nasution, 2008

Pendidikan yang dilaksanakan pada masa Politik Etis dilakukan dengan gaya modern lebih condong seperti pendidikan yang ada di Eropa. Awal mulanya pendidikan guru tidak begitu diminati oleh berbagai kalangan disebabkan gaji guru pada saat itu sangat kecil, dengan fenomena tersebut pemerintah melakukan kenaikan gaji untuk profesi guru dan memberikan keistimewaan kepada guru lulusan *Kweekschool* untuk dapat ditempatkan ke dalam setiap jabatan pemerintah tanpa izin Gubernur Jendral (Nasution, 2008).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa guru bumiputera merupakan tenaga pendidik yang berasal dari masyarakat pribumi dengan tujuan memberi ilmu kepada anak didik. Dalam pandangan masyarakat guru merupakan

seorang yang dapat mengajar di berbagai tempat seperti formal maupun non formal. Pada masa penjajahan Belanda sekolah khusus guru didirikan dengan nama *Kweekschool* dari lembaga tersebut muncullah guru-guru pribumi pada masa penjajahan Belanda.

2.1.4 Politik Etis

Di awal abad ke-20 pemerintah Belanda mengalami perubahan terhadap kebijakan yang ada. Kebijakan yang diperbarui ini memiliki tujuan baru, kebijakan tersebut dikenal dengan Politik Etis. penerapan politik etis diawali ketika ada suatu masalah kemanusiaan. Pemerintah Belanda mendapat beberapa kecaman yang diutarakan di dalam novel Max Havelaar (1860) dan berbagai pengungkapan lain hingga membuahkan hasil (Ricklefs, 2007).

Orang-orang yang berdarah Belanda banyak menyuarakan dukungan pemikiran guna mengurangi penderitaan masyarakat Jawa yang mengalami penindasan. Maka dari itu pemerintahan Belanda mengambil langkah supaya permasalahan yang terjadi dapat ditangani, berusaha mengambil tindakan agar masalah yang sedang terjadi dapat teratasi, pemerintah diharapkan dapat memperhatikan rakyat jajahan, salah satu tokoh yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Belanda adalah van Deventer (Galih, 2017).

Kebijakan Politik Etis merupakan kebijakan yang diperjuangkan golongan liberal dan sosial demokrat mereka berkeinginan supaya rakyat pribumi

merasakan keadilan, golongan liberal dan sosial demokrasi beranggapan bahwa Hindia Belanda telah memberikan sumbangsih yang besar dalam meningkatkan devisa serta kemakmuran atas pemerintahan Belanda (Oktavianuri, 2018).

Pada awalnya konsep politik etis hanya digunakan oleh bangsa Belanda sebagai istilah kritikan-kritikan dari para kalangan liberal dan sosial demokrat yang diwakili oleh Van Kol, van Deventer, dan Brooschooft. Tokoh-tokoh tersebut adalah mereka yang menginginkan keadilan bagi rakyat pribumi. Brooschooft mengungkapkan selama satu abad lebih pemerintah telah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat akan tetapi tidak mengembalikan sepeserpun. Politik Liberal mengutamakan prinsip kebebasan guna memberikan kesempatan untuk pengusaha menggunakan tanah rakyat dan berbagai peraturan dibuat dengan tujuan melindungi pengusaha Belanda. Sehingga menyebabkan banyak rakyat yang kehilangan tanah dan bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhannya dan masyarakat mengalami demoralisasi karena hal tersebut timbulah disorganisasi masyarakat (Notosusanto, 2010).

Van Deventer salah satu keturunan Belanda yang mengkritik pemerintah dengan menulis sebuah artikel yang berjudul "*Een Eresculd*" dalam majalah *De Gids* pada tahun 1899. Dhakidae (2003) menjelaskan secara etimologi tentang judul yang ditulis oleh van Deventer, kata *Een Eresculd* untuk memahami beban etis kolonial Belanda. '*Eeresculd*' merupakan gabungan kata '*eere*', yang memiliki arti kehormatan, dan '*schuld*' yang berarti hutang, sehingga '*Een Eeresculd*'

berarti hutang kehormatan, yang terangkum di dalamnya sebagai kebijakan etis dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan pribumi.

Pada 17 September 1901 ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengumumkan mengenai suatu penyidikan tentang taraf kesenjangan masyarakat di Jawa yang menjadi akhir dari pemikiran van deventer bahwa pemikirannya dituangkan dalam pidato ratu Belanda tersebut. Isi pidato ratu Belanda yaitu:

“Sebagai Negara Kristen, Nederland berkewajiban di Kepulauan Hindia Belanda untuk lebih memperhatikan penduduk pribumi, memberikan jalan yang tegas terhadap Kristenisasi serta meresapi keseluruhan tingkah laku pemerintahan dengan kesadaran bahwa Nederland mempunyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubungan dengan itu, kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus. Kami menginginkan diadakannya penelitian tentang sebab musababnya.”

Peristiwa tersebut dipandang sebagai bentuk ekspresi dari ide baru dan praktik politik yang kemudian dikenal dengan nama Politik Etis atau Politik Balas Jasa. Prinsip dari politik etis ini kemudian sangat bertentangan dengan politik eksploitasi materi pada masa pemerintahan kolonialisme yang telah lalu. Politik etis akhirnya menonjolkan sikap kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi terhadap bangsa yang tertindas (Nasution, 2008).

Van Deventer mampu menguatkan suara yang ampuh, ia dapat menyebarkan pemikiran dan konsep-konsepnya sendiri, dengan tujuan yang sangat baik. van Deventer menciptakan suatu yang baru dengan berperanan melaksanakan misi

menyebarkan kebijakan baru. Maksud baik yang dimiliki van Deventer menjadikan ia dijuluki sebagai “Bapak Penggerak Etis” (Neil, 1984).

Pelaksanaan politik etis diwujudkan dengan tiga program utama yaitu irigasi, transmigrasi dan edukasi (Bagas, 2018).

a. Irigasi (Pengairan atau Infrastruktur)

Irigasi adalah program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana guna kesejahteraan rakyat, dengan keutamaan membangun waduk-waduk besar untuk menampung air hujan yang dapat digunakan oleh petani, serta untuk melakukan perbaikan untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Tidak hanya itu terdapat pula perbaikan sarana infrastruktur terutama dalam membangun jalan raya dan kereta api yang berguna untuk mempermudah pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Perbaikan sistem pertanian adalah bagian dari pelaksanaan politik etis, sebab semakin baik pertanian yang dihasilkan maka dapat mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Edukasi (Pendidikan)

Edukasi merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya untuk pemerintahan Belanda juga yaitu mendapatkan tenaga kerja terdidik untuk birokrasinya namun dengan gaji yang murah, karena apabila

mendatangkan tenaga kerja dari Eropa tentunya akan memakan banyak biaya dengan memberikan gaji yang mahal dan menyediakan sarana dan prasarana, yang di kemudian akan dibuat sekolah dengan dua tingkatan yaitu sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan tuan tanah sekolah kelas II untuk pribumi kerja menengah dan biasa dengan mata pelajaran menulis, membaca, ilmu bumi, berhitung, sejarah dan menggambar.

c. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerataan pendudukan Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa pada tahun 1900, selain itu jumlah perkebunan pun sudah begitu luas maka kawasan untuk pemukiman semakin sempit, mengenai permasalahan tersebut maka dibuatnya pemukiman di Sumatera Utara dan Selatan dimana dibukakannya perkebunan baru yang membutuhkan banyaknya tenaga pengelola dan pegawai. Untuk pemukiman Lampung adalah salah satu daerah yang menjadi tujuan pusat transmigrasi dari Jawa dan Madura (Oktavianuri, 2018).

Di awal Kolonialisasi, masing-masing kepala keluarga memperoleh biaya sebesar 20 *Gulden*, selain biaya tersebut mereka juga mendapatkan biaya sumbangan berupa biaya hidup sebesar 0,4 *gulden*/hari selama masa penyiapan tanah. Jumlah biaya langsung

diperkirakan sekitar 300 *gulden* per keluarga yang mencakup premi, biaya transportasi, biaya makan 150 *gulden*, biaya bangunan rumah 65 *gulden*, pembelian alat-alat 13,5 *gulden*, ditambah 0,7 hektar tanah sawah dan 0,3 hektar tegalan serta pekarangan (Setiawan, 2010).

Setelah percobaan kolonial pada tahun 1905-1911 dapat dilaksanakan percobaan tersebut kemudian diteruskan pada 1927. Dalam periode itu 1911-1927, Bank diikutsertakan untuk membantu memberi kredit usaha dan untuk membeli alat-alat sebagai bekal kerja bagi para kolonis. Setiap KK biasa mengambil kredit sampai 200 *gulden*s. Khususnya untuk keperluan itu, maka didirikan *de Volkkredit Bank voor de lampungsche Distriethen* pada bulan Maret 1911 (Swarso, 1985).

Sementara itu, gelombang transmigrasi berikutnya dilaksanakan sekitar tahun 1930-1935. Dalam periode itu, dunia dilanda oleh krisis ekonomi yang hebat, sehingga menyebabkan banyak perusahaan terpaksa tutup dan mengurangi tenaga kerjanya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah luar Jawa, mengembalikan buruhnya yang telah diberhentikan ke desa masing-masing yang ada di Jawa. Karena desakan oleh keadaan di Jawa, sekalipun krisis ekonomi menghambat, pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1932

memulai lagi usaha pemindahan penduduk yang semulanya sempat diberhentikan tahun 1927 (Munawiyanto, 2004).

Berikut merupakan program utama yang dilakukan pada kebijakan Politik Etis, namun dari ketiga program tersebut pendidikan merupakan program prioritas dikarenakan kedua program lainnya akan berhasil jika ditunjang oleh program pendidikan. Dukungan politik etis pun datang dari kalangan kapitalis dan industrialis dikarenakan kedua golongan tersebut sangat diminati sebab mereka ingin memasarkan hasil industrinya ke wilayah Hindia Belanda, sekaligus mengadakan perbaikan ekonomi penduduk yang telah berjasa terhadap pemerintahan Belanda.

Jadi dapat disimpulkan dari keterangan diatas bahwa politik balas bud adalah sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Politik etis lahir karena penderitaan rakyat Indonesia yang dipekerjakan terus menerus tanpa adanya imbalan. Selain itu pihak Belanda juga meraup keuntungan dari tanah Indonesia dengan mengeksploitasi kekayaan alamnya dengan mempekerjakan rakyat pribumi.

2.1.5 Konsep Program Pendidikan Pada Masa Politik Etis

Pendidikan secara umum memiliki pengertian yaitu segala upaya yang direncanakan untuk mengetahui orang lain baik individu, kelompok, atau

masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat (Notoadmodjo, 2003).

Pendidikan merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sudah semestinya usaha dalam menumbuhkan kembangkan pendidikan secara sistematis dan berkualitas perlu terus diupayakan, sehingga tujuan dari proses pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti penting bagi individu, pendidikan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.

Sedangkan pengertian pendidikan di dalam politik etis merupakan sebuah program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf, serta meningkatkan taraf pendidikan rakyat bumiputera, memberikan kesempatan belajar dengan membangun sekolah-sekolah rakyat. Edukasi adalah sebuah kebijakan untuk, memperluas pengajaran dan pendidikan (Sumanto, 1983).

Jenis-jenis pendidikan yang diterapkan pada masa politik etis yaitu:

1. *Eurospeesch Lagere School* (ELS)

Sekolah tingkat dasar, yang memerlukan waktu tujuh tahun untuk dapat lulus pendidikan di sekolah ELS. Dalam kegiatan belajar mengajar ELS

menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah yang menggunakan sistem dan metode seperti sekolah di negeri Belanda ini pada awalnya hanya terbuka bagi warga Belanda dan golongan eropa lainnya. Akan tetapi, sejak tahun 1903 kesempatan belajar juga diberikan kepada orang-orang pribumi golongan atas dan warga Tionghoa.

2. *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS)

Sekolah ini pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1914 seiring dengan dibentuknya politik etis. *Hollandsch-Inlandsche School* berada pada jenjang pendidikan rendah atau setingkat dengan pendidikan dasar. HIS diperuntukan bagi golongan penduduk keturunan Indonesia asli sehingga disebut juga Sekolah Bumiputera Belanda. Sekolah ini disediakan untuk golongan bangsawan, tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Setelah menyelesaikan pembelajaran selama tujuh tahun, murid yang pandai dan mempunyai orang tua dengan tingkat perekonomian tinggi, dapat melanjutkan pendidikan di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*).

3. *Hollandsch-Chineesche School* (HCS)

Hollandsch-Chineesche School adalah sekolah yang didirikan pemerintahan Belanda di Indonesia Khusus untuk anak-anak keturunan Tionghoa di Hindia Belanda, sekolah ini didirikan pertama kali di Belanda pada tahun 1908. Pada awal pendirian sekolah ini bertujuan untuk menandingi sekolah-sekolah berbahasa Mandarin yang didirikan oleh Tionghoa Hwee Koan. Karena

sekolah berbahasa Mandarin banyak menarik minat warga Tionghoa, pemerintahan kolonial pun mendirikan sekolah sejenis.

4. *Inlandsch School*

Inlandsch School merupakan sekolah bumiputera daerah. Hanya diperlukan waktu belajar selama lima tahun untuk menyelesaikan pendidikan, pembelajaran yang disampaikan dalam sekolah *Inlandsch School* hanyalah sebatas kemampuan membaca, menulis, dan menggambar.

5. *Volksch School*

Volksch School sering disebut *Rajatschool* adalah sekolah desa dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Dalam sistem pendidikan kolonial, sekolah ini termasuk sekolah dasar kelas dua yang diperuntukan bagi golongan pribumi kelas bawah.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa edukasi dalam politik etis adalah sebuah bentuk kegiatan pendidikan proses belajar yang mengubah seseorang untuk berkembang dan sebuah pendidikan juga memiliki arti penting untuk memajukan sebuah bangsa, pendidikan yang awalnya dimanfaatkan Belanda untuk mengeruk keuntungan supaya mendapatkan tenaga kerja yang murah akan tetapi pendidikan dapat merubah pola pikir masyarakat Indonesia lebih maju.

III. METODE PENELITIAN

Hakikat metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya bukan sebagaimana harusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu (Sugiyono, 2006). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai dengan sesuai yang dikehendaki, atau cara kerja yang sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan pendekatan ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek sebagai sasaran ilmu yang bersangkutan atau cara yang dapat digunakan sebagai suatu ilmu.

Sedangkan menurut Babbie dalam Harnani (2020) “Metode penelitian pada prinsipnya menceritakan cara yang merupakan alat (*tool*) mencapai tujuan. Cara yang dilakukan penelitian bervariasi dan tidak kaku serta tergantung dari objek formal ilmu pengetahuan tersebut, tujuan serta jenis data yang akan diungkapkan. Penelitian umumnya mengandung dua ciri, yaitu logika dan pengamatan empiris. Dengan demikian metode berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan sesuatu”.

3.1 Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan dalam bukunya *A Guide to Historical Method* “Metode sejarah adalah seperangkat asas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang diubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis” (Gilbert, 1984).

Metode historis merupakan gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang diramu secara lengkap dan ilmiah, menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lalu dan segala bentuk kejadian dengan maksud meneliti secara kritis (Fuadi, 2005). Dari beberapa penjelasan menurut ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah merupakan proses pengujian rekam peninggalan masa lalu dengan cara sistematis untuk membuktikan sebuah penelitian secara kritis dan hasilnya dapat menyelesaikan sebuah masalah yang diteliti.

Langkah-langkah dalam penelitian historis meliputi:

1. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan data-data atau sumber-sumber sejarah.
2. Kritik adalah menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejatinya baik bentuk maupun isinya.

3. Interpretasi adalah setelah mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan maka kita merangkai fakta-fakta itu menjadi keseluruhan masuk akal.
4. Historiografi adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian (Notosusanto, 2010).

Berdasarkan langkah-langkah penelitian historis, maka langkah-langkah kegiatan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah:

- a. Heuristik (Pengumpulan data)

Heuristik merupakan sebuah tahap dalam mencari bukti (pembuktian) atau bahan-bahan sumber (baik sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder) yang diperlukan (Wasino, 2018). Heuristik merupakan tahapan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Pada tahap heuristik difokuskan untuk mencari arsip-arsip dokumen yang berkaitan dengan sejarah guru bumiputera pada masa Politik Etis, yang dilakukan di Lembaga Perpustakaan Nasional di Jakarta, di masa pandemic Covid-19 penelitian dilakukan secara *online* melalui *WhatsApp*, selain itu peneliti juga mengumpulkan sumber arsip dari *web* Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sumber dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu;

- a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber atau penulis yang terlibat, melihat, atau terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa. Sumber primer dalam sejarah adalah sumber yang direkam dan disampaikan secara langsung oleh saksi mata. Dalam studi sejarah, sumber-primer disebut

juga sumber asli atau bukti (Lestari, 2013). Sumber primer juga dapat berupa sumber tertulis, seperti arsip, dokumen, naskah, catatan harian, korespondensi, surat kabar, piagam, dan benda-benda lainnya yang ditulis ketika peristiwa itu terjadi, atau yang ditulis oleh seseorang yang ada dalam peristiwa itu. (Laksono, (2018).

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bawa sumber primer merupakan bukti sebuah peristiwa, dapat berupa sumber dalam bentuk rekaman atau disampaikan secara langsung dan berupa sumber tertulis seperti arsip, dokumen dan lainnya. pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian dan pencatatan dokumen dengan mengumpulkan data dari surat kabar yang berkaitan dengan sejarah guru bumiputera pada masa Politik Etis seperti surat kabar Medan Goeroe Hindia, Soera Ra'jat dan surat Algemene Secretarie Besluit GG.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sebuah istilah yang dipakai dalam historiografi untuk menunjukan pada karya sejarah yang ditulis berdasarkan sumber-sumber primer. Sumber sekunder biasanya mengandung laporan peristiwa pada masa lampau, sumber sekunder juga berupa deskripsi, interpretasi, analisis, atau evaluasi sumber primer, atau mengulas bukti-bukti dari sumber primer (Laksono, (2018).

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Sejarah Pendidikan Indonesia Karya Dr. S. Nasution, M.A.
- 2) Sejarah Perjuangan Jati Diri PGRI Karya Restoeningroem.
- 3) Sejarah Indonesia Modern Karya Merle Calvin Ricklefs
- 4) Sejarah Pendidikan Karya Djumhur dan Danasuparta
- 5) Sejarah Pendidikan di Indonesia Jaman Penjajahan Karya Djohan Makmur
- 6) Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901-1942) Karya Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri Jurnal Vol.3 No.1 Maret 2015.
- 7) Penerapan Politik Etis Di Surabaya Tahun 1911-1930 Karya Dhimas Rangga Galih Jurnal Vol.5 No. 3, Oktober 2017
- 8) Perkembangan Kweekschool (Sekolah Guru) Di Yogyakarta Tahun 1900-1927 karya Praresta Sasmaya Dewi Jurnal Vol.4 No. 3 tahun 2019.

b. Kritik

Kritik merupakan tahapan untuk memeriksa apakah sumber-sumber yang telah diperoleh apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki atau tidak. Biasanya sejarawan melaksanakan kegiatan heuristik dengan kritik hampir bersamaan, pengumpulan sumber dan kritik sumber-sumber sejarah secara serempak (*Simultaneously*). Kegiatan tersebut ditemukannya sumber-

sumber sejarah sekaligus dilakukannya uji sumber. Uji validitas sumber sejarah ilmiah yang dalam penelitian sejarah lebih dikenal sebagai kritik (verifikasi) sumber sejarah (Daliman, 2012).

Dalam hal ini peneliti bermaksud menguji kebenaran dari data atau informasi yang diperoleh, dengan cara mencocokkan beberapa sumber yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan sumber. Menilai atau menyelidiki kevalidannya atau tidak, untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menyesuaikan data yang diperoleh sesuai dengan tema penelitian.

c. Interpretasi

Menurut Laksono (2018) “Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Penafsiran yang dimaksud adalah peneliti sumber yang telah dipilih agar dapat menguraikan hasil penelitian mengenai pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis. setelah melakukan kritik sumber, peneliti menuliskan uraian penafsiran dan analisis pada sumber yang telah dilakukan kritik sumber.

d. Historiografi

Langkah terakhir yang dilalui oleh peneliti sejarah adalah penulisan atau historiografi. Pada tahap akhir ini peneliti akan mengumpulkan semua hasil penelitiannya bentuk tulisan atau dibukukan. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lalu berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (Gottschalk, 1975). Penulisan sejarah ini disusun berdasarkan metode penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung, sehingga menjadi suatu kajian mengenai pengembangan sejarah sebagai disiplin akademik, dan secara luas merupakan karya sejarah mengenai topik tertentu.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Selain memerlukan adanya suatu metode, dalam suatu penelitian juga dibutuhkan untuk menentukan teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan.

1. Teknik dokumentasi

Menurut Suharmi Arikunto “Teknik dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lainnya” (Arikunto, 1998). Sementara itu menurut Husaini Usman

dan Purnomo “ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen”(Usman, 2003). Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka teknik dokumentasi ini menjadi tambahan dalam mengumpulkan sumber primer berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah guru bumiputera pada masa Politik Etis yang terdapat di Lembaga Perpustakaan Nasional dan web Arsip Nasional Indonesia. Peneliti memperoleh dokumen-dokumen ini secara Online melalui *WhatsApp* dan *Website*. Dokumen yang diperoleh antara lain sebagai berikut.

- a. ANRI, Algemene Secretarie Besluit GG 18 Juli 1911
- b. Soera Ra’Jat 10 Juni 1919 halaman 4
- c. Medan Goeroe Hindia Februari – Maret 1921 halaman 2 dan 8

2. Teknik kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang bersifat teoritis seperti buku, dokumen, dan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan topik peneliti bahas. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang terinci mengenai hal-hal yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sugandi, 2015).

Menurut Joko Subagyo (2006) “Teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang

akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek-objek yang diamati secara terperinci melalui buku-buku yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti sehingga memperluas pengetahuan dan menganalisa permasalahan”

Berdasarkan pendapat ahli diatas, teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sehingga dapat menambah pengetahuan dan dapat menganalisa permasalahan yang diteliti.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu tahapan atau cara pada proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuan yang dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2006). Menurut Matthew B.Milles & Huberman (1992) “Teknik Analisis data adalah proses menata, menstrukturkan dan memaknai data yang tidak teratur. Jadi perlu sebuah proses dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Setelah peneliti memperoleh data-data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data untuk diinterpretasikan dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan, oleh karena itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan bersifat tertulis.

Menurut pendapat Joko Subagyo (2006), “Penelitian kualitatif adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau memuatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya”.

Tahapan-tahapan analisis data kualitatif menurut Matthew B. Miles dan Michael yaitu:

1. Reduksi data, adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam, menggolongkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sampai akhir bias menarik sebuah kesimpulan.
2. Penyajian data, adalah penyajian data yang dapat dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam menganalisis atau mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

3. Verifikasi data, adalah menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah di uji kebenarannya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya (Milles, 1992).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti dengan mengumpulkan informasi dan menyusun sebuah opini penulisan melalui data yang telah diperoleh dan dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan.

3.4 Ruang Lingkup Penelitian

Melihat analisis di atas maka dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman diberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup.

3.4.1 Objek Penelitian

Objek penelitian penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sarana penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian ini, peneliti membatasi ruang lingkup, objek dalam penelitian ini “program pendidikan pada masa Politik Etis”.

3.4.2 Subjek Penelitian

Subjek peneliti adalah suatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Guru Bumiputera.

3.4.3 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Indonesia secara *daring*.

3.4.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada Tahun 2021.

3.4.5 Konsep Ilmu

Konsep ilmu pada penelitian ini adalah Ilmu Sejarah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan di dalam bab-bab diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah berupaya melakukan pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis, antara lain;

1. Pemerintah melakukan perluasan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa, jumlah sekolah dan peserta didik meningkat namun keberadaan guru pada saat itu tidak seimbang, banyak surat kabar yang membicarakan permasalahan kekurangan guru yang terjadi baik di sekolah bangsawan maupun sekolah rakyat biasa. Banyak masyarakat yang merasa khawatir tentang kelangsungan pendidikan anaknya, para orang tua beranggapan bahwa Kepala Departemen Pengajaran sengaja melalaikan keperluan pengajaran bagi anak-anak bangsa Eropa, hanya bermaksud memperbaiki pengajaran untuk anak-anak pribumi. pada kenyataannya kekurangan guru tidak hanya terjadi pada sekolah-sekolah anak bangsa Eropa saja sekolah anak pribumi juga mengalami kekurangan.
2. Pemerintah memperluas pendidikan guru untuk mengatasi masalah yang ada berikut pendidikan guru yang ada pada masa politik etis yaitu Sistem Magang, Cursus Volk Onderwizer (Guru Bantu), Normaalcursus 2 tahun, Normaalschool, Kweekschool, Hogere Kweekschool, Kursus Hoofdacte. Selain itu pemerintah

juga mengambil keputusan pada tahun 1912 untuk melatih guru berbangsa Indonesia agar mendapat diplomat bahasa Belanda.

3. Setelah melakukan beberapa upaya, jumlah guru terus bertambah dari tahun 1930-1940, bahkan guru-guru telah memiliki ijazah resmi yang dapat menjadi nilai tambah dalam pekerjaannya. Pada tahun 1930 jumlah guru yang tidak memiliki ijazah sejumlah 8.597 dan pada tahun 1940 tercatat hanya ada 1 orang guru di sekolah HIS dan 2 orang guru di ELS yang tidak memiliki ijazah. Maka dapat kita ketahui bahwa kualitas guru terus bertambah

5.2 Saran

Sehubung dengan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan saran-saran diantaranya, sebagai berikut :

1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang Pengadaan Guru Bumiputera Untuk Memenuhi Program Pendidikan Pada Masa Politik Etis, karena masih banyak sisi lain yang masih bisa dikaji lebih lanjut supaya memperoleh sebuah gambaran yang lebih lanjut tentang pendidikan pada masa Politik Etis.
2. Diharapkan dapat lebih mengerti tentang pengadaan guru bumiputera untuk memenuhi program pendidikan pada masa politik etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S. (2014). The making of politically conscious Indonesian teachers in public schools, 1930–42. *Southeast Asian Studies*, 3(1), 119__8211_.
- Angoedi, A. (1984) . *Sejarah Irigasi Di Indonesia*. Komite Nasional Indonesia, International Commision on Irrigation and Drainage (ICID).
- ANRI, Algemeen Secretarie Besluit GG 18 Juli 1911.
- Anri,go.id (2015) . Naskah Sumber Arsip Seri Pendidikan. Diakses pada 02 Maret 2021, dari <https://anri.go.id/sekitar-arsip/arsip-statis/naskah-sumber>
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. P.T. Rieneka Cipta : Jakarta.
- Arsyad, M. (2017). *Modul Pengetahuan Umum Irigasi Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru*. Bandung: Kementerian PUPR
- Bagas, M. (2018). *Seri Pengayaan Pembelajaran Sejarah Indonesia: Masa Kolonial*. Kalimantan Barat: PT. Marga Borneo Tarigas.
- Bodnar, H.G. dan William S.H. (2003). *Accounting Information System. Sistem Infromasi Akuntansi Edisi Kedelapan*. Dialihbahasakan oleh Deddy Jacobus. Jakarta : Indeks
- Dahlan, M. H. (2014). Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi, Kokuminggakari, Dan Transmigrasi Di Provinsi Lampung (1905-1979). *Patanjala*, 6(3), 335-348.
- Daliman, A, (2012). *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*. Yograkarta: Ombak.
- Dewi, P. S. (2019). PERKEMBANGAN KWEEKSCHOOL (SEKOLAH GURU) DI YOGYAKARTA TAHUN 1900-1927. *Ilmu Sejarah-S1*, 4(3).
- Djumhur dan Danasuparta.(1976). *Sejarah Pendidikan*. CV Ilmu : Bandung.

- Fuadi, F. (2015). Metode Historis: Suatu Kajian Filsafat Materialisme Marx. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 219-230.
- Galih, D. R. (2017). Penerapan Politik Etis Di Surabaya Tahun 1911-1930. *Avatara*, 5(3).
- Gilbert J. Graghan, A. (1984). *Guide to Historical Method*. Fordham University Press : New York.
- Gottschalk, L. 1975. Mengerti Sejarah, Jakarta : Universitas Indonesia-UI Press.
- Harnani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup.
- Handayani, S.A. (1994). *Transmigrasi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Jember*: Universitas Jember.
- Heeren, H.J. (1979). *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Jaya, I. C., & Kasum, G. (2012). Hoogere Burgerschool (HBS): Pendidikan Untuk Kaum Elite di Surabaya Tahun 1923-1950. *A Journal, Verlenden*, 1(1), 13-25.
- Kristiani, Y. (2019). *Politik ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1842*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Lestari, E. T. (2016). PENGARUH PENGGUNAAN SUMBER PRIMERDALAM PEMBELAJARAN IPS/SEJARAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA (STUDI KUASI EKPERIMEN DIMTs SWASTA AL-IKLAS KUALA MANDOR B PONTIANAK). *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 152-163.
- Laksono, A. (2018). *Apa Itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian*. Kalimantan : Derwati Press.
- Makmur, D. Dkk. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Jaman Penjajahan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Mestoko, S. (1979), *Pendidikan di Indonesia, Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Depdikbud. Milles, M.B. dan Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang MetodeMetode Baru*. Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.).Jakarta: UI Press.
- Medan Goeroe Hindia Februari – Maret 1921 halaman 2 dan 8.

- Moehadi, Dkk. (1981). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: CV. EKA DHARMA.
- Munawiyoto, M. (2004). *Mengenal dan memahami Transmigrasi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan .
- Nasution, S. (2008) *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Natalia, M., Isjoni, & Bunari. (2018). Sejarah Berdirinya Vervolg School Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1913-1940. *Jurnal Online Mahasiswa*, 7(1).
- Neil, Robert. (1984). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Deliar, Z. 2018. Pustaka Jaya: Jakarta.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notosusanto, N. 2010. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Intidayu Press, Jakarta.
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN*.
- Oviyanti, F. (2016). Tantangan pengembangan pendidikan keguruan di era global. *Nadwa*, 7(2), 267-282.
- Oktavianuri, D. (2018). *Politik Etis dan Pergerakan Nasional*. Kalimantan Barat: Derwati Press.
- Rickleffs, M. C. (2007) . *Sejarah Indonesia Modern*. Gajah Mada Press : Yogyakarta.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Roestiyah, N.K. (2001). *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan* . Bina Aksara: Jakarta.
- Restoeningroem, Dkk. (2019). *Sejarah Perjuangan Jati Diri PGRI*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Setiawan, N. 2010. *Satu abad transmigrasi di Indonesia: perjalan sejarah*. Bandung Universitas Padjajaran.

Soera Ra'jat 10 Juni 1919 halaman 4.

Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, Dkk. -. *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. TIM UNY.

Sugandi, U., Denny, H., dan Ratnamulyani, I. A. (2015). *Hubungan Pengawasan Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Effectiveness of Working Relationship With The Supervision of Employess*. Jurnal Governans. 1 (1), 35-43.

Sumanto, Wasty & F.X Soeyarno.(1983). *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya:Usaha Nasional.

Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403-416.

Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*. Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika.

Swarso, Sri & Masri. (1985). *Taransmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI Press.

Syahrudin & Heri,S. (2019). *Sejarah pendidikan Indonesia*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Usman, H. dan Purnomo S.A. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Paeni, M. (2009). *Sejarah Kebudayaan Indonesia : Sistem Pengetahuan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Putra, M. R. A. (2015). Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa dalam Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB) Unit Pembangkit Paiton). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 19(2).

Pemerintahan Hindia Belanda (1911-1933). Diakses pada 15 Maret 2021. Dari <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/perserikatan-guru-hindia-belanda-pghb-sebagai-wadah-organisasi-guru-bumi-putera-pada-masa-pemerintahan-hindia-belanda-1911-1933-2/>

Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20-34.

Wismulayani, E. (2018). *Sejarah Transmigrasi*. Cempaka Putih: Jakarta.

Wukir. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah*. Yogyakarta: Multi Presindo

Zuhairini.M. dkk. (2004). *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara : Jakarta.